

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi, akan tetapi sifatnya tidak sama dengan faktor-faktor produksi yang lain. Faktor produksi sumber daya alam dan modal misalnya, dapat saja dalam periode tertentu tidak dimanfaatkan dan juga kelebihan sumber alam dan modal tidak mengurangi pendapatan masyarakat. Akan tetapi tenaga kerja sebagai faktor produksi tidak dapat dibiarkan untuk tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dikehendaki adanya kelebihan tenaga kerja. Sebab tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan atau yang berlebihan akan menjadi beban bagi masyarakat yang bekerja, dan ini akan membatasi rata-rata pendapatan. Oleh karena itu faktor tenaga kerja selain sangat berhubungan dengan pendapatan masyarakat juga mempunyai konsekuensi sosial dan politik dalam suatu negara.

Problem pengangguran terbuka di Indonesia masih belum bisa diatasi oleh pemerintah. Sepanjang 2009-2010, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) hanya mampu menurunkan 1,5 persen dari total pengangguran /tahun. Memasuki 2011 pengangguran terbuka sekarang ada pada angka 9,25 juta. Program baru pun disusun Kemenakertrans yakni bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam menyebarkan informasi lowongan kerja.

Masalah tenaga kerja terutama pengangguran di Indonesia berkaitan sangat erat dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk, struktur umur, persebaran penduduk/ urbanisasi, pendidikan dan keterampilan, yang merupakan aspek suplai, serta pertumbuhan pendapatan dan produktivitas tenaga kerja, yang merupakan aspek permintaannya. Dalam hal ini perhatian ditujukan disamping kepada persediaan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan pembangunan dan permintaan tenaga kerja yang merupakan ukuran kelebihan atau kekurangan dari yang dibutuhkan dalam suatu sistem ekonomi.

Beberapa penulis (seperti Mazumar, 1981; United Nation, dan Edwards 1974) menyatakan bahwa ukuran pengangguran tidak begitu berarti di Negara sedang berkembang, namun bagi Negara-negara industri maju merupakan salah satu penyebab utama dari kemiskinan. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) dalam masyarakat sedang berkembang dapat saja tercatat sangat rendah meskipun terdapat kesenjangan yang besar antara persediaan tenaga kerja dan banyaknya kesempatan untuk pekerjaan produktif. Hal ini menurut United Nation (1998) disebabkan karena mereka yang seharusnya sebagai penganggur terbuka dalam sistem ekonomi maju, di NSB tersebar sebagai pekerja dengan berbagai bentuk pengangguran tersembunyi (*invisible unemployment*), setengah pengangguran (*underemployment*), atau pemanfaatan tenaga kerja yang tidak penuh (*labour underutilization*). Oleh karena itu beberapa penulis (dalam Squire, 1981:68-69,77) menyatakan bahwa dalam mempelajari pengangguran terbuka maka bentuk-bentuk *underemployment* tersebut diatas berfungsi sebagai ukuran tambahan. Selanjutnya dinyatakan oleh Squire bahwa taksiran-taksiran

pengangguran dapat dipandang sebagai indikator ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja dan underemployment sebagai ukuran kemiskinan. Jadi dapat dikatakan bahwa perubahan pengangguran untuk semua bentuk merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, sehingga penting untuk dipelajari permasalahannya di Indonesia.<sup>1</sup>

Jumlah penduduk yang tinggi di Negara sedang berkembang seperti Indonesia mempunyai sisi positif dan negatif dalam hal masalah ketenagakerjaan, sisi positifnya adalah jika jumlah penduduk yang tinggi tetapi dibarengi dengan produktivitas yang tinggi maka akan menguntungkan Negara itu sendiri tetapi jika sebaliknya, jumlah penduduk yang tinggi namun tidak dibarengi dengan produktivitas yang dapat diukur dari tingkat pendidikan salah satunya maka akan menjadi masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan serta akan menjadi beban bagi pemerintah. Maka dari itu pemerintah perlu memikirkan bagaimana caranya menggunakan semaksimal mungkin atau memberdayakan tenaga kerja penuh dari jumlah penduduk yang besar tersebut, agar masalah seperti pengangguran dapat teratasi diseluruh provinsi di Indonesia. Kemudian dilihat dari jumlah penduduk, banyak ulasan yang ditujukan pada usaha-usaha untuk menggambarkan keseimbangan pasar tenaga kerja melalui jumlah penduduk yang menganggur dengan pendekatan konsep “angkatan kerja” di Negara-negara agraris seperti Indonesia. Misalnya bahwa persediaan tenaga kerja, dalam hal ini persediaan waktu dari angkatan kerja anggota rumah tangga, merupakan fungsi

---

<sup>1</sup>Farid Alghofari, Jurnal ekonomi, Pengangguran di Indonesia 2007.

*opportunity costs* dari kegiatan ekonomi dan non- ekonomi, dan permintaan akan pendapatan (Standing,1978:55-56)

Dari struktur umur, Beberapa ahli menggunakan batas maksimum usia 24 tahun sebagai penduduk muda. Lluch dan Madzumar (1983) menggunakan batas 10-24 tahun sebagai kategori tenaga kerja muda, dan menyebutnya sebagai kelompok umur kritis. Bairoch(1988) menyatakan bahwa pada kebanyakan kasus dari penelitiannya kelompok tersebut terutama 15-24 tahun, memperlihatkan tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keseluruhan kelompok umur, sebab pada umur tersebut merupakan waktu peralihan dari lepas sekolah dan memasuki angkatan kerja.<sup>2</sup>

Masalah selanjutnya adalah mengenai persebaran penduduk dalam hal ini adalah urbanisasi. Berdasarkan data, meningkatnya angka urbanisasi di Indonesia mencapai 75 persen.<sup>3</sup>

“Situasi ini menjadi sebuah persolan tersendiri sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran bertambah, sebab tidak semua kaum urban membekali dirinya dengan keahlian maupun pendidikan ,” meningkatnya angka urbanisasi secara langsung ikut mempengaruhi permasalahan sosial terutama pengangguran dan kemiskinan.

Masalah ketenagakerjaan yang tetap menonjol yang selanjutnya adalah pendapatan/pengupahan, Perhatian pemerintah terhadap nasib pekerjanya sebenarnya bukan cerita baru, banyak kebijaksanaan pemerintah yang ditujukan

---

<sup>2</sup> Ibid.,p1

<sup>3</sup> Robby Alexander Sirait, Urbanisasi dan Perkembangan Perkotaan di Indonesia,2007 <http://robbyalexandersirait.wordpress.com/2007/10/05/urbanisasi-mobilitas-dan-perkembangan-perkotaan-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 27 maret 2011)

untuk perbaikan nasib para pekerja, antara lain K3, Jamsostek, dan upah minimum. Namun pada kenyataannya pelaksanaan peraturan-peraturan ini banyak mengalami hambatan, baik karena ketidakmampuan maupun kurangpedulian pengusaha, tercermin dari banyaknya kasus pemogokan buruh yang menuntut haknya.

Nampaknya sampai saat ini pemerintah Indonesia masih meyakini bahwa upah minimum merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki nasib pekerja yang berpenghasilan rendah dan meningkatkan produktivitas kerjanya. Hal ini diyakini oleh international labour organization (ILO) yang mengemukakan bahwa *“minimum wages have an important role to play in protecting low income groups.”*(ILO 1991,h5).

Permasalahan baru yang dihadapi Kemenakertrans, tenaga kerja di Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang 50 persen lebih hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Selain itu jenis kelulusan calon tenaga kerja tidak sesuai dengan peluang yang tersedia. LIPI mencatat, tingkat warga yang termasuk dalam kategori setengah pengangguran terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dari 29,64 juta orang pada 2005 menjadi 32,8 juta pada 2010. Diperkirakan pada 2011, jumlah warga dengan kategori setengah pengangguran diproyeksikan meningkat menjadi 34,32 juta orang.”<sup>4</sup>

Pengangguran tidak saja dialami oleh kelompok tenaga kerja tidak terdidik tetapi juga oleh tenaga kerja terdidik lulusan SMA dan Sarjana. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh harian kompas, tanggal 6 februari 2008, tercatat per

---

<sup>4</sup> Bogor Smart Entrepreneur.2007.<http://www.komunitasBSE.com> (diakses pada tanggal 1 Januari 2011)

februari 2007 terdapat 740,206 penganggur lulusan perguruan tinggi, dan kondisi ini akan terus meningkat sebanyak 20% pertahun. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan proporsi antara tingkat lulusan yang terjadi tiap tahun dan lapangan pekerjaan yang tersedia.<sup>5</sup>

Melihat masalah lainnya diatas peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh antara Tingkat Upah Minimum dan Tingkat pendidikan terhadap Pengangguran di Indonesia.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

1. Apakah jumlah dan pertumbuhan penduduk di suatu Negara dapat mempengaruhi perkembangan jumlah pengangguran?
2. Apakah persebaran penduduk/urbanisasi dapat mempengaruhi jumlah pengangguran?
3. Apakah pertumbuhan pendapatan atau tingkat upah dapat mempengaruhi jumlah pengangguran?
4. Apakah tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pengangguran?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, peneliti membatasi penelitian mengenai Pengaruh antara Tingkat Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pendidikan Tinggi Terhadap Pengangguran di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Maisaroh. Analisis “*Faktor-faktor penentu kesuksesan pendidikan Entrepreneurship*”. Kompilasi Jurnal ekonomi.2006.p.35

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat Pengaruh antara Tingkat Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Tingkat Pendidikan Tinggi terhadap Pengangguran?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti:

a. Kegunaan Teoretis

Terkait dengan pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang mendalam baik bagi peneliti pribadi maupun bagi pembaca sekalian terutama mengenai pengaruh antara tingkat upah dan tingkat pendidikan terhadap pengangguran di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengaruh. tingkat upah dan tingkat pendidikan terhadap pengangguran di Indonesia.